

SIARAN PERS

PENANDATANGANAN

NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding/MoU*) PENGEMBANGAN *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)*

Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB
Auditorium Gandhi, Lt 2 Gedung BPKP Pusat Jl, Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur

Pemerintah Republik Indonesia menginisiasi Program *State Accountability Revitalization (STAR)* untuk mendukung reformasi pemerintah Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. STAR merupakan program yang dibiayai melalui pendanaan dari Asian Development Bank (Loan ADB Nomor 2927-INO). Melalui program STAR, telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas personil auditor dan pengelola keuangan negara, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditunjuk sebagai *Executing Agency* yang bertanggungjawab dalam suksesnya pelaksanaan program ini. Salah satu kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa program S2 dan S1 kepada Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintahan Daerah. Sampai dengan Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S1 sebanyak 452 dan S2 sebanyak 1.503, sehingga secara kumulatif sebanyak 1.955 orang atau 78,20% dari target DMF (*Design and Monitoring Framework*).

Selain memberikan beasiswa S2 dan S1/DIV, Program STAR juga berupaya melakukan *transfer of knowledge* kepada aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan pusat unggulan (*Center of Excellence*) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia.

Hal ini diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Pengembangan *Center of Excellence (CoE)*. *CoE* merupakan bentuk sinergi antara BPKP sebagai praktisi di bidang pengawasan sektor publik, dan Perguruan Tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset dan teori, serta dengan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) pengembangan *Center of Excellence (CoE)* dilaksanakan antara Kepala BPKP Ardan Adiperdana dengan 9 Gubernur di wilayah pengembangan *CoE* yang disaksikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebagai bentuk dukungan terwujudnya pengembangan *CoE*.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan di awal acara dengan didahului pengantar oleh Kepala BPKP.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam dan PMK Binsar H. Simanjuntak selaku penanggungjawab STAR BPKP, dengan Rektor dari 8 Perguruan Tinggi

Indonesia (Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin) serta dengan 14 Bupati/Walikota wilayah pengembangan *CoE* (Bupati Kab. Sleman, Bupati Kab. Bandung, Bupati Kab. Gresik, Bupati Kab. Ngajuk, Bupati Kab. Situbondo, Bupati Kab. Lamongan, Bupati Kab. Merauke, Bupati Kab. Gorontalo, Bupati Kab. Anambas, Bupati Kab. Bogor, Bupati Kab. Purbalingga, Bupati Kab. Pangkep, Bupati Kab. Bantaeng, dan Walikota Pare-Pare).

Melalui *CoE* sinergi antara BPKP, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan terus berlanjut (*sustain*) menjadi tiga pilar yang saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan kompetensi SDM, penguatan kapasitas Perguruan Tinggi. Secara kongkrit melalui *CoE* akan dikembangkan produk-produk unggulan dan inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya pada bidang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* dan *Fraud Solution*, Manajemen Resiko, Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah, *Local Government Index* dan Manajemen Aset. Ruang lingkup *CoE* meliputi pengelolaan kegiatan penelitian, diseminasi hasil penelitian, desain metodologi praktis, dan kegiatan pelatihan, sekaligus dalam rangka menyosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan *CoE* kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan *CoE* antara BPKP, Gubernur dan antara BPKP, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah ini akan menegaskan komitmen dari BPKP, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah tidak hanya untuk sekedar pelaksanaan pengembangan *CoE* secara formal, tetapi menjadi momentum yang lebih tinggi, yaitu demi akuntabilitas pemerintah yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik.

**Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP
Jl Pramuka No. 33 Jakarta Timur, 13120**

**Telp/Fax: 021-8584985, situs web: www.bpkp.go.id, surel: humas@bpkp.go.id
CP: Nuri Sujarwati: 081281129932, Tri Endang Mudiastuti : 081218472336,
Ratna Wijihastuti: 081328571757**